

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tujuan dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kondisi pertumbuhan inklusif Indonesia sejak tahun 2016-2022 terus mengalami perbaikan. Pada tahun 2022 33 dari 34 provinsi di Indonesia sudah mencapai pertumbuhan inklusif melalui angka  $IG > GG$  (indeks pertumbuhan inklusif yang lebih besar dibanding pertumbuhan ekonomi). Pencapaian pertumbuhan inklusif diakibatkan penurunan ketimpangan pendapatan dan tingginya penyerapan tenaga kerja pada tahun 2022 yang dicerminkan melalui Indeks Pertumbuhan Inklusif menurunkan ketimpangan dan Indeks Inklusif Penyerapan Tenaga Kerja (Lampiran).
2. Pada indikator pendidikan, angka partisipasi sekolah membawa pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Dengan demikian, partisipasi pendidikan mampu meningkatkan pertumbuhan inklusif melalui peningkatan keterampilan yang berdampak terhadap peningkatan produktivitas pekerja, sehingga mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
3. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan membawa pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Hal ini mengindikasikan adanya inefisiensi pengelolaan pembiayaan pendidikan yang menghambat efek positif belanja pendidikan terhadap pertumbuhan inklusif. Dengan demikian, pertumbuhan inklusif dapat dicapai apabila kuantitas pendidikan disertai oleh pengelolaan pengeluaran pemerintah yang berkualitas dan efisien.
4. Umur harapan hidup yang baik mengarahkan tenaga kerja lebih produktif karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk berinvestasi pada keterampilan dan pengetahuan. Oleh sebab itu, seiring bertambahnya umur harapan hidup akan memperpanjang kesempatan individu untuk memperbaiki kesejahteraannya sehingga pertumbuhan inklusif secara keseluruhan bisa tercapai.

5. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan inklusif Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan pembiayaan kesehatan Indonesia sudah cukup baik yang dicerminkan oleh beberapa kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan inklusif sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi yang positif angka partisipasi sekolah terhadap pertumbuhan inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas pendidikan yang disertai oleh ketepatan waktu bersekolah menjadi stimulus pertumbuhan inklusif. Namun, pemerintah harus segera memperbaiki kebijakan pada belanja pemerintah bidang pendidikan, agar inefisiensi bisa diatasi.
2. Peningkatan umur harapan hidup dan pengelolaan pembiayaan kesehatan sudah menunjukkan hal yang baik terhadap pertumbuhan inklusif, namun pemerintah harus tetap mengawasi regulasi kesehatan yang berdampak terhadap pertumbuhan inklusif.
3. Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan terkait metode penghitungan pertumbuhan inklusif dimana literatur terkait penghitungan skor secara keseluruhan masih kurang lengkap. Selain itu, pemilihan variabel modal manusia masih mengalami keterbatasan diakibatkan literatur yang masih terbatas, sehingga pembahasan penelitian masih belum mencakup keseluruhan aspek-aspek modal manusia.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji pertumbuhan inklusif berdasarkan metode penghitungan selain PEGR dan menambahkan faktor-faktor makroekonomi lain yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan inklusif.

### C. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pertumbuhan inklusif di Indonesia:

1. **Peningkatan Efisiensi Pengeluaran Pendidikan:** Meskipun pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan inklusif, hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya reformasi dalam pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih efisien dan berdampak nyata. Pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan tepat sasaran, meningkatkan kualitas pengajaran, dan meminimalkan pemborosan agar investasi pendidikan dapat mendukung pertumbuhan inklusif.
2. **Mendorong Partisipasi Pendidikan:** Dengan temuan bahwa partisipasi pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan inklusif, kebijakan yang mendukung akses lebih luas ke pendidikan menengah dan keterampilan perlu diperkuat. Pemerintah dapat mendorong program beasiswa, pengurangan biaya pendidikan, dan peningkatan infrastruktur pendidikan terutama di daerah-daerah tertinggal untuk meningkatkan partisipasi sekolah.
3. **Penurunan Ketimpangan Pendapatan:** Mengingat bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan adalah faktor penting dalam pertumbuhan inklusif, kebijakan redistribusi pendapatan yang adil melalui program-program sosial, peningkatan upah minimum, serta perlindungan terhadap pekerja harus lebih diutamakan. Selain itu, peningkatan akses terhadap kesempatan kerja juga harus diperhatikan untuk mengurangi ketimpangan.
4. **Peningkatan Harapan Hidup dan Produktivitas:** Kebijakan kesehatan harus lebih difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas, sehingga usia harapan hidup dapat terus meningkat. Seiring bertambahnya usia harapan hidup, pemerintah perlu mendorong pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan dan produktivitasnya guna mendukung pertumbuhan inklusif jangka panjang.

Dengan penerapan kebijakan yang fokus pada efisiensi pengeluaran pendidikan, peningkatan partisipasi sekolah, serta pengurangan ketimpangan, pertumbuhan inklusif dapat dipercepat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

